



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : RSUD BENDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI HERI WIBAWA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 44746

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.450.489.240
1. Tanah dan Bangunan Seluas 713 m2/400 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.744.526.840		
2. Tanah Seluas 2.244 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, Rp. 705.962.400		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	145.000.000
1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	352.030.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.118.488
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.963.637.728
III. HUTANG	Rp.	2.470.003.975
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.493.633.753

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

UNIT KERJA : RSUD BENDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIFAYANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 743386

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.665.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/48 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/125 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 429.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, ALPHARD SC PREM SOUND MPV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 189.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 620.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.903.500.000

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.703.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : RSUD BENDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIKZA DINI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 618821

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 682.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/125 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.400.000

1. MOTOR, HONDA KHARISMA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000
2. MOTOR, SUZUKI NEX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 110 ESP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 143.061.603

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 957.711.603

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 957.711.603

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

UNIT KERJA : RSUD BENDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI HANDAYANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 743385

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	144.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	190.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	281.960.206
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.615.960.206
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.615.960.206

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

UNIT KERJA : RSUD BENDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIMAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 743382

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/100 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PICKUP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 425.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 247.537.580

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.632.537.580

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.632.537.580

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.